



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD TAUFIK
2. Jabatan : DIREKTUR OPERASI
3. NHK : 757727

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 11.524.000.000**

1. Tanah Seluas 381 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.143.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 378 m2/53 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.586.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
4. Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.827.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/75 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.680.000.000
6. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.088.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 480.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN/ALTIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI DELICA MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MPV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 90.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 887.163.237**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.981.163.237
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.981.163.237

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.